

FIVE POWER DEFENCE ARRANGEMENTS DALAM PANDANGAN KONSTRUKTIVISME

Angga Nurdin Rahmat

Dosen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Ahmad Yani

ABSTRACT

Five Power Defence Arrangements is the legacy of the cold war era in Southeast Asia. The purpose of forming this arrangement is for protecting Malaysia and Singapore from the communism expansion while Britain already lost the military supremacy. Despite the cold war has ended since two decade ago and Southeast Asian Nation already strengthen their regional organization (ASEAN), but FPDA still show its existence by conducting joint exercise and mostly took place in Southeast Asia. Beside that the IADS (Integrated Area Defence System) also still maintaining and upgrading. The existence of FPDA due to the reason of threat construction that linked by their identity and interest of each nation. Threats construction became an intersubjectivity communicated in frame of FPDA and the materialized in the form of joint exercise. The articles examines that threats construction by the five nations under FPDA frame became a based of FPDA existence which showing by the joint exercise on this frame. Whereas the five nations still consider that to face the threat construction in each nations the support form other country is needed, especially who have cooperative interaction with those country which the identity shaped by the historical background.

Keywords: *FPDA, Constructivism, Threat*

Pendahuluan

Pada tahun 1967 negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi regional bernama *Association of Southeast Asian (ASEAN)*. Dibentuk untuk menggalang kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Keunikan dari pembentukan organisasi ini adalah kesepakatan dari tiap-tiap negara untuk tidak melakukan campur tangan dalam politik dalam negeri masing-masing negara anggota, serta tidak diperbolehkannya pembentukan pakta pertahanan di wilayah ini. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya pengukuhan ASEAN sebagai *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)* pada tahun 1971 di Kuala Lumpur (Amitav Archaya, 2002: 82).

Pembentukan ASEAN sebagai wilayah bebas dari pakta pertahanan didasarkan pada pandangan ketidakberpihakan organisasi ini terhadap salah satu blok kekuatan yang pada saat tersebut terlibat dalam perang dingin. Negara-negara Asia Tenggara tidak ingin menjadikan kawasan ini sebagai lahan pertarungan diantara dua kekuatan tersebut, seperti yang pernah terjadi di Indocina (Perang Vietnam) pada masa itu. Kawasan Asia Tenggara berharap bisa menjadi sebuah kekuatan yang mampu meredam setiap gejolak yang terjadi pada tataran

politik internasional agar tidak mempengaruhi negara-negara anggotanya serta menjaga stabilitas kawasan.

Namun tidak setiap negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai cara yang sama dalam memandang stabilitas kawasan. Singapura dan Malaysia misalnya, merasa bahwa untuk menjamin keamanan negaranya dari ancaman negara lain atau khususnya salah satu blok yang sedang bertarung salah satu caranya adalah dengan mendekatkan diri pada salah satu kekuatan atau membentuk sebuah kerjasama keamanan kolektif. Kerjasama kolektif ini tidak harus berbentuk pakta pertahanan, tetapi bisa dengan *security community* atau *defence community*.

Terkait dengan ancaman yang dirasakan oleh masing-masing negara keberadaan *security community* atau *defence community* menjadi hal yang cukup esensial khususnya bagi negara-negara yang lemah dalam hal pertahanan. Menurut (Simon Seldom, 2002) “*Security community focused on cooperation to resolve dispute and conflict within the regional grouping*, sementara “*defence community implying the need for some form of trilateral or multilateral arrangements within the group*”. Kedua bentuk kerjasama pertahanan-keamanan tersebut di atas bukanlah sebagai bentuk dari pakta pertahanan, melainkan kerjasama keamanan internasional yang difokuskan untuk menyelesaikan konflik regional.

Hal ini diimplementasikan dengan adanya kerjasama yang digalang oleh negara-negara bekas jajahan Inggris (*commonwealth*) dengan membentuk *Five Power Defence Arrangements* (FPDA). Kerjasama pertahanan ini melibatkan Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Sebuah kerjasama yang dibentuk pada tahun 1971 ini bertujuan untuk melindungi Singapura dan Malaysia yang baru saja merdeka dari kekuasaan Inggris. Karena pada saat itu dua negara tersebut dirasakan belum mampu untuk mengembangkan sistem pertahanan mereka secara mandiri. Ancaman yang dimaksud pada saat itu adalah Indonesia yang merupakan negara dengan armada militer terbesar dan terancang. Tetapi ketika dua negara tersebut telah berhasil mengembangkan sistem pertahanan serta Indonesia tidak lagi merupakan ancaman seirig degan bergantinya rezim yang berkuasa, namun FPDA masih tetap diberlakukan di 5 negara tersebut bahkan semakin ditingkatkan. Artikel ini diintensikan untuk menjelaskan mengapa FPDA tersebut tetap dipertahankan oleh negara-negara anggotanya?

Gambaran Umum *Five Power Defence Arrangements* (FPDA)

Pembentukan FPDA merupakan salah satu cara bagi Inggris agar tetap dapat menjalankan komitmennya terhadap negara yang berada di bawah perlindungannya, tanpa harus mengeluarkan biaya dan sumber daya yang besar. FPDA lebih bersifat longgar dari pada AMDA, dimana dalam kerangka ini

Inggris, Australia dan New Zealand akan mengambil langkah konsultasi jika kedua negara yang menjadi objek perlindungan yang berada dalam kerangka FPDA tersebut mengalami serangan. FPDA bukan merupakan aliansi yang mengikat dan bersifat formal, tetapi bersifat sangat longgar dan fleksibel. Kelonggaran dalam hal ini terkait dengan tidak ada paksaan kepada negara anggotanya untuk tetap berada dalam kerangka ini dan sewaktu-waktu apabila sudah merasa tidak relevan dapat meninggalkan kerangka ini. Serta fleksibilitas dalam melakukan berbagai aktivitas terkait dengan latihan serta pengerahan material untuk mendukung operasional latihan FPDA ini.

Pada tahun 1971, saat FPDA ini ditandatangani oleh anggotanya ada sekitar 3000 pasukan Australia, 2550 pasukan Inggris dan 1150 pasukan New Zealand bermarkas di Malaysia dan Singapura (Menon, 1988: 316). Selain itu berbagai peralatan juga disiagakan di kedua negara tersebut mencakup 6 Frigate, 4 pesawat intai maritim dan satu helikopter milik angkatan bersenjata Inggris, Australia menempatkan 2 squadron pesawat tempur Mirage (Charlyl A Thayer, 2007: 82). Selain itu Australia dan Inggris secara bergantian menempatkan kapal selamnya di wilayah ini. FPDA yang menitikberatkan pada pertahanan udara, selanjutnya kemudian membuat *Integrated Air Defence System* (IADS) pada 1 September 1971. Sistem ini bertanggungjawab untuk mempertahankan wilayah udara Malaysia dan Singapura yang dianggap tidak terpisahkan (Damon Bristow, 2005:3). IADS pada awal pembentukannya berfungsi sebagai pertahanan udara yang terintegrasi dengan dukungan dari 1 kapal frigate, pesawat transport dan personel dari New Zealand. Komponen ini yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan dalam FPDA.

Pembentukan IADS ini diperlukan untuk memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang berada di kawasan IADS tersebut. Kecepatan dalam memberikan tanggapan menjadi kelebihan utama yang dimiliki oleh FPDA baik dalam kerangka bantuan secara materil dalam bentuk pengerahan peralatan militer maupun pasukan secara langsung atau hanya sekedar informasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh negara yang memiliki wilayah kedaulatan di kawasan tersebut. Kebutuhan ini yang saat ini harus menjadi prioritas utama dalam memberikan rasa aman terhadap negara-negara yang berada di bawah payung IADS ini. Negara-negara ini tidak berada sendirian dalam mengawasi wilayah yang cukup rawan akan aksi perompakan maupun ancaman dari negara lain.

FPDA menjadi sebuah kerjasama pertahanan yang sangat rapi karena memiliki struktur organisasi lengkap yang mendukung teknis operasional terkait dengan latihan-latihan yang digelar. Negara anggota FPDA secara geografis memang tidak berasal dari kawasan yang sama, hal ini memerlukan koordinasi yang tepat dan efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Hal ini memerlukan strategi organisasi yang kuat, karena FPDA tidak dapat menggelar berbagai

latihan yang sering dilakukan di Asia Tenggara tanpa ada organisasi yang baik dan kuat. Menurut Charlyl A Thayer (2007) dalam sistem organisasinya FPDA memiliki 5 struktur organisasi, yaitu:

1. *FPDA Defence Ministers' Meeting (FDMM)*

FDMM adalah badan tertinggi yang berwenang dalam pembuatan kebijakan. Pertemuan yang diadakan tiga tahunan ini yang dilakukan oleh menteri pertahanan dari lima negara anggota FPDA dan Komandan dari *Chief Integrated Defence Area System (CIADS)* ini adalah untuk memberikan arahan bagi strategi FPDA. FDMM menjadi ajang bagi pemerintah negara anggota untuk dapat merumuskan strategi dan latihan seperti apa yang hendak dilakukan dengan melihat situasi dan perkembangan internasional dan domestik yang ada di negara masing-masing.

2. *FPDA Defence Chiefs' Conference (FDCC)*,

FDCC merupakan salah satu badan senior yang berada dalam struktur FPDA. Peran dari FDCC ini adalah menyediakan laporan dan masukan-masukan kepada FDMM. FDCC ini secara rutin melakukan pertemuan dan dihadiri oleh CIADS. FDCC memiliki tanggung jawab secara profesional kepada aktivitas militer dari FPDA. Sejak tahun 2001, pertemuan informal dari pada kepala pertahanan FPDA digelar bersamaan dengan *Shangri-la Dialogue* yang diselenggarakan di Singapura yang didukung oleh International Institute of Strategic Studies (IISS).

3. *FPDA Consultative Council (FCC)*

Dewan konsultatif FPDA ini merupakan pertemuan yang diwakili oleh menteri pertahanan Malaysia dan Singapura serta dihadiri oleh dewan komisi tinggi dan konsultan untuk Australia, New Zealand, Inggris serta Jajaran Komando dari IADS. Pertemuan ini dilakukan dua tahunan dengan mengambil tempat di dua negara yaitu Malaysia dan Singapura secara bergantian. FCC memiliki tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan mengenai perencanaan dan penyusunan anggaran. Tujuan dari FCC adalah berkonsultasi dengan pemerintah negara anggota FPDA untuk membuat sebuah formulasi mengenai bagaimana cara meningkatkan efisiensi dari IADS dan mengembangkan cara dalam memperluas, meningkatkan level dan memodernisasi latihan-latihan yang akan digelar dalam kerangka FPDA.

4. *FPDA Activities Coordination Council (FACC)*

FACC terdiri atas pasukan yang mewakili seluruh anggota FPDA dan dari markas pusat IADS. Pertemuan FACC ini dilakukan setiap dua tahun sekali. FACC dibutuhkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada FCC untuk mengkoordinasikan latihan dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh FPDA. Dalam FACC ini terbagi atas 3 group yang memiliki tugas masing-masing yang mencakup komunikasi, logistik dan kebijakan.

5. *FPDA Professional Forum.*

Forum ini melibatkan seminar yang dilakukan secara berkala yang disponsori oleh Malaysia dan Singapura dengan undangan dari tiga negara lain yang masuk sebagai anggota FPDA yaitu Inggris, Australia dan New

Zealand. Seminar ini membahas mengenai level operasional dan fokus kepada topik yang menjadi kepentingan bersama bagi FPDA. Dalam forum ini melibatkan presentasi yang dilakukan oleh pembicara tamu serta diskusi secara interaktif dengan partisipan yang terdiri atas para perwira menengah dari masing-masing anggota peserta. FPDA Profesional Forum ini pertama kali digelar pada tahun 1997 di Singapura, dimana Singapura dan Australia yang bertindak sebagai tuan rumah.

Konstruksi Ancaman Terkait Identitas dan Kepentingan Dalam Eksistensi FPDA

Ancaman yang terkait dengan keamanan merupakan konstruksi dari sebuah negara dalam pola hubungan internasional. Konstruksi ini akan membimbing sebuah negara dalam membuat kebijakan dan tindakan dalam melakukan hubungan sosial dengan negara lain baik yang bersifat kooperatif maupun konflikatif terkait dengan konstruksi ancaman dibuat berdasarkan identitas dan kepentingan yang ada pada diri mereka. Dalam hal ini FPDA menjadi sebuah konstruksi dimana lima negara yang ada didalamnya berinteraksi secara sosial dalam sifat yang kooperatif untuk menghadapi perubahan dinamika ancaman dan mengakomodasi kepentingan mereka secara kolektif berdasarkan kepada identitas yang ada pada diri mereka. Peter Berger (1992) menyatakan bahwa setiap negara sama dengan manusia yang memiliki beberapa identitas yang terkait dengan peran yang mereka jalankan sesuai dengan identitas tersebut.

Konstruksi Ancaman Terkait Identitas dan Kepentingan Inggris Dalam FPDA

Five Power Defence Arrangements merupakan komitmen yang diberikan oleh Inggris kepada negara bekas jajahannya yang dalam hal ini adalah Malaysia dan Singapura untuk melindungi kedua negara tersebut. Komitmen ini diberikan mengingat pasca lepas dari kekuasaan Inggris, kedua negara tersebut belum memiliki kemampuan militer yang cukup dalam rangka melindungi wilayah mereka dari berbagai ancaman baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Inggris memiliki dua negara yang pernah menjadi bagian dari kebesaran imperium Inggris dimasa kolonial yaitu Malaysia dan Singapura di Asia Tenggara serta Australia dan Selandia baru di Oseania. Perhatian dan komitmen Inggris ini diperlihatkan dengan menempatkan anggaran pertahannya di zona pertahanan negara persemakmuran setelah di NATO dan pengembangan senjata nuklirnya (Walter Goldstein, 1970).

Pembentukan aliansi maupun kerjasama militer dengan negara-negara bekas jajahannya menunjukan pula bahwa, Inggris masih memiliki ambisi mengembangkan ambisi militer globalnya dan mempertahankan wilayah persemakmurannya dalam rangka memenuhi kepentingannya dalam identitas “kekuatan imperium” tersebut, dimana hal ini menjadi postur pertahanan Inggris yang terus dipelihara hingga saat ini (Ashley Jackson, 1970). Selain itu negara-negara yang dahulu berada dalam wilayah kekuasaannya telah diberikan kemerdekaan sepenuhnya. Meski demikian negara-negara yang telah diberikan kemerdekaan tersebut masih terikat dengan status sebagai negara

persemakmuran dimana Inggris masih bertanggungjawab atas keamanan maupun kesejahteraan dari negara-negara tersebut. Upaya ini merupakan kewajiban Inggris sebagai “pelindung” terkait perannya dengan identitas “kekuatan imperium”nya bagi negara-negara yang berada bawah payung negara persemakmuran dari ancaman yang terkait dengan identitas yang dihasilkan dari interaksi antara Inggris dan negara persemakmurannya tersebut. Pembentukan aliansi dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, khususnya yang berada dalam payung persemakmuran menjadi kebijakan Inggris demi mempertahankan identitasnya sebagai “pelindung” mereka.

Aliansi dan kerjasama pertahanan merupakan salah satu kebijakan pertahanan yang menjadi perhatian pemerintah Inggris. Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan Inggris disebutkan bahwa:

“Alliances and partnerships will remain a fundamental part of our approach to defence and security. Internationally, we rarely act alone. Maintaining and building constructive and reciprocal bilateral relationships across all aspects of national security can enhance capability and maximise efficiency. And supporting the development of major multilateral institutions and instruments can underpin a more robust rules-based international system and reflect the changing balance of global power.”

Dalam laporan ini menyebutkan bahwa aliansi merupakan salah satu upaya pokok pertahanan dan keamanan Inggris. Meskipun Inggris senantiasa menjadikan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai prioritas dalam kebijakan aliansinya, namun Inggris tidak dapat melepaskan ikatan aliansi-aliansinya dengan negara lain khususnya dengan negara-negara yang menjadi bekas jajahannya.

Dalam konteks saat ini meski Singapura dan Malaysia sudah lebih dari cukup untuk dapat mempertahankan dirinya sendiri dalam kapabilitas militernya, namun tidak membuat Inggris dapat melepaskan diri untuk tetap melakukan hubungan dengan kedua negara tersebut melalui FPDA. FPDA menjadi mekanisme bagi Inggris untuk membentuk identitas sebagai “hegemon” di kawasan Asia Tenggara terkait dengan penolakan masuknya AS ke dalam kawasan ini. Penolakan tersebut datang dari Indonesia maupun Malaysia, Inggris akan menjadi wakil dari AS untuk mengamankan kepentingannya di wilayah ini. Identitas Inggris sebagai “hegemon” terkait dengan perubahan interaksi yang terjadi saat Uni Soviet dan komunisme yang ada di Indocina tidak lagi menjadi ancaman karena berakhirnya perang dingin.

Dinamika keamanan di Asia Tenggara pasca perang dingin membuat ancaman baru terhadap identitas Inggris di kawasan ini. Salah satu ancaman terkait dengan identitas Inggris sebagai negara “barat” yang diasosiasikan sebagai sekutu AS terkait dengan munculnya terorisme yang menjadikan simbol-simbol

negara barat sebagai sasaran serangannya. Terlebih di kawasan ini banyak terdapat kepentingan AS dan negara barat lainnya baik yang berupa perusahaan multinasional maupun fasilitas terkait dengan aktivitas warga negara mereka yang berada di kawasan ini. Terorisme seakan menjadi mimpi buruk yang dapat disamakan dengan komunisme pada masa perang dingin. Hal ini terkait dengan benturan diantara identitas yang dibawa oleh para teroris dan negara yang menjadi sasaran yang merupakan negara dengan simbol identitas “barat”.

Identitas sebagai kekuatan “hegemon” seakan terancam kembali dengan munculnya China sebagai kekuatan baru di Asia. Asia Tenggara memang telah mendeklarasikan bahwa kawasannya bebas dari campur tangan negara asing, namun besarnya kepentingan negara-negara di luar Asia Tenggara pada kawasan ini membuat negara-negara luar senantiasa berupaya untuk menyebarkan pengaruhnya baik secara politis maupun ekonomi di kawasan ini. Inggris yang sejak masa kolonial telah memiliki jaringan untuk masuk melalui dua negara bekas jajahannya ini merasa terancam terkait dengan perkembangan ekonomi dan militer China yang dirasakan dapat menggeser pengaruh negara barat di kawasan ini.

Untuk tetap melanggengkan identitas Inggris sebagai “hegemon” di kawasan Asia Tenggara, maka FPDA dapat menjadi instrumen yang cukup efektif. Ketidakjelasan dari bentuk FPDA menjadi keuntungan bagi negara-negara anggota di luar kawasan Asia Tenggara untuk masuk ke wilayah ini. Bahkan Damon Bristow menggambarkan FPDA sebagai “*Southeast Asia’s Unknown Regional Security Organization*”. Konstruksi ancaman yang muncul dijadikan sebagai justifikasi bagi negara-negara diluar kawasan untuk ikut campur atau melakukan intervensi ke dalam wilayah ini. Ancaman terorisme dan bajak laut di Selat Malaka menjadi isu yang saat ini banyak menjadi perhatian. Bahkan ada indikasi kuat, Biro Maritim Internasional (IMB) yang syarat dengan kepentingan Inggris, mendorong Singapura dan Malaysia menggembar-gemborkan aksi perompakan kelompok teroris asal Aceh di Selat Malaka (Hendrajit, 2010).

Sebagai negara dengan angkatan laut yang cukup kuat Inggris bisa saja masuk untuk mengamankan kepentingan di wilayah ini, namun penolakan kehadiran pasukan asing di wilayah Asia Tenggara menjadi kendala bagi Inggris. Jalur Selat Malaka menjadi lalu-lintas vital bagi perdagangan dunia tidak terkecuali bagi Inggris. Konstruksi ancaman seperti terorisme yang menjadi prioritas termasuk didalamnya adalah perompakan serta ancaman yang bersifat non tradisional seperti kejahatan cyber, bencana alam dan krisis militer tertuang dalam kebijakan pertahanan Inggris yang disampaikan kepada parlemen Inggris pada tahun 2010.

Konstruksi Ancaman Terkait Identitas dan Kepentingan Australia dalam FPDA.

Terkait dengan dinamika kawasan Asia Pasifik dan khususnya Asia Tenggara pasca perang dingin Australia dengan identitas sebagai negara “barat”, Australia senantiasa ingin melakukan upaya “hegemoni” di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. Upaya ini terkait dengan kedekatan AS yang juga memiliki kepentingan besar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dapat dilihat pada Buku Putih Pertahanan Australia 2000 dapat dipersepsikan bahwa Australia benar-benar ingin menjadi “deputy sheriff” bagi AS di Asia-Pasifik (Ikhar Nusabakti, 2000). Akan tetapi, hal ini mendapatkan tantangan saat Australia menganggap bahwa kebangkitan China dapat mengancam identitas Australia sebagai negara “deputy sheriff” yang menjadi wakil AS di Asia Pasifik. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari kementerian pertahanan Australia pada saat kunjungan Hillary Clinton ke Australia yang menyebutkan, “AS dan Australia adalah sekutu penting dengan sejarah kepentingan politik bersama serta peningkatan kerja sama masa depan di bidang perdagangan, teknologi, dan kepentingan transnasional” (www.medialndonesia.com, 2010).

China yang menjadi negara yang bertahan dengan ideologi komunisnya pasca perang dingin dianggap sebagai salah satu ancaman bagi barat di Asia. Hal ini adalah efek dari mentalitas perang dingin yang hingga kini masih ada dalam perspektif barat. Sebagai negara dengan identitas barat, apa yang disebut dengan “China sebagai ancaman” banyak ditemukan di Australia (Athiqah Nur Alami, 2005: 168). Perspektif ini semakin diperkuat dengan kemajuan yang dicapai China dalam bidang ekonomi dan pertahanan yang dianggap akan menggeser hegemoni negara barat di kawasan ini. Selain memiliki kemampuan untuk berdiplomasi secara luas di kawasan ini, China juga salah satu negara pemegang kunci di Asia. Dengan demikian China mampu berperan sebagai penyeimbang bagi negara-negara barat yang selama ini mendominasi kawasan Asia. Kehadiran China sebagai kekuatan baru tentu saja mengancam dominasi barat yang diwakili Australia di kawasan Asia Pasifik maupun Asia Tenggara.

Identitas sebagai negara barat tidak pelak menjadikan Australia sebagai sasaran dari terorisme yang mulai menunjukan perlawanannya terhadap identitas dan kepentingan barat pasca serangan 11 September 2001. Terorisme kemudian menjadi salah satu ancaman yang ada terkait dengan identitas Australia sebagai negara “barat”. Hal ini semakin menjadi kenyataan setelah banyak kepentingan maupun warga Australia yang menjadi sasaran aksi terorisme khususnya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Contohnya adalah pemboman kedutaan besar Australia dan Tragedi Bom Bali yang terjadi di Indonesia. Australia kemudian menjadi negara yang giat mengkampanyekan perang melawan terorisme di Asia Tenggara bersama dengan AS dalam *Global Coalition Against Terrorism*. Ancaman ini tertuang dalam buku putih pertahanan Australia tahun 2003; *A Defence Update*, yang mengidentifikasi tiga area ketidakpastian dan resiko yaitu, terorisme global, senjata pemusnah massal dan kawasan bermasalah (Athiqah Nur Alami, 2005: 104). Dalam buku putih

pertahanan tahun 2009 menyebutkan bahwa pandangan Australia terkait ancaman dan kepentingan di kawasan Asia Tenggara antara lain: (Australian Government Departement of Defence, 2009: 34)

1. *A secure and stable Southeast Asia is in Australia's strategic interests as neither a source of broad security threat, nor as a conduit for the projection of military power against us by others. Southeast Asia should remain largely stable, and reform-minded enough to sustain reasonable rates of development. The global financial and economic downturn is likely to impinge on political stability in regional countries to varying degrees.*
2. *Power relativities in Southeast Asia will shift, but less than in Northeast Asia. Southeast Asia will benefit from its proximity to China and India, but will also feel their competitive pressure. China will make its presence felt through soft as well as economic power, including aid, multilateral diplomacy and extensive bilateral cultural and educational links. But China will have even more interest in convincing regional countries that its rise will not diminish their sovereignty.*
3. *Economic progress and social development will continue to be priorities for the countries of Southeast Asia. They will continue, in differing degrees, to be beset by security problems such as terrorism, insurgency and communal violence, but regional governments as a general rule appear to be able to contain these problems. Burma remains a serious challenge for the region with the potential for instability to spill across its borders.*
4. *Counter-terrorism responses in Southeast Asia will most probably continue to limit the expansion of local Islamist extremist networks; although vigilance will be required for many years yet before the threat can be declared to have diminished to negligible levels. The risk of terrorist attacks in Southeast Asia with a potential to affect Australian interests, or threaten Australians, will remain of concern for the foreseeable future.*

Kepentingan yang didasarkan kepada identitas dari Australia di kawasan Asia Tenggara tidak mungkin dapat dicapai tanpa melakukan kerjasama dan intervensi ke dalam kawasan. Tetapi permasalahannya adalah ketika Australia terbentur dengan kebijakan negara-negara Asia Tenggara yang menolak kehadiran negara luar untuk masuk kedalam politik kawasan. Untuk itu Australia harus menggunakan FPDA yang didalamnya terdapat Malaysia dan Singapura yang merupakan negara didalam kawasan sebagai usaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya terkait dengan upaya mengatasi ancaman-ancaman yang tertuju kepada Australia. Selain itu adalah untuk mengamankan kepentingan keamanan Australia di Asia Tenggara dengan menjaga stabilitas kawasan yang dianggapnya selalu bergejolak (Oman Heryaman, 2001: 96).

FPDA menyediakan jalan bagi kehadiran Australia secara langsung ke dalam kawasan Asia Tenggara (Khoo How San, 2000). Hal ini dirasa sangat penting mengingat sebagai negara yang diluar kawasan Asia Tenggara kehadiran Australia akan banyak ditentang oleh berbagai negara dikawasan tersebut, khususnya dari Indonesia. Dimana FPDA menjadi halangan dalam hubungan baik antara Jakarta-Canberra, namun hal ini tidak menjadi kekhawatiran dari Australia. Australia menganggap bahwa FPDA akan lebih efektif untuk

mencapai kepentingan yang ada di kawasan Asia Tenggara terkait dengan identitas yang dimiliki oleh Australia dan negara-negara anggota FPDA yang ada di kawasan ini. Dimana Australia tidak akan menuai kecurigaan terkait dengan kehadirannya di dalam kawasan dalam kerangka tersebut.

Konstruksi Ancaman Terkait Identitas dan Kepentingan New Zealand Dalam FPDA

Seiring dengan perubahan yang terjadi dengan berakhirnya perang dingin. Identitas sebagai negara yang “anti komunis” mulai luntur seiring dengan hilangnya ancaman dari komunisme. Perubahan ini membawa New Zealand lebih memfokuskan kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. New Zealand menjadi negara pelindung bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan dan dianggap sebagai “pemimpin” di kawasan ini. Tetapi permasalahan yang sama pun dihadapi adalah keterbatasan negara ini dalam hal kekuatan militer untuk mengamankan wilayah tersebut. Oleh karena itu New Zealand memerlukan bantuan dari negara lain, jika sewaktu-waktu negara ini harus melindungi negara-negara kecil tersebut. FPDA menjadi salah satu payung untuk menjaga kredibilitas New Zealand di kawasan Pasifik Selatan.

Terkait dengan identitas sebagai negara “barat”, New Zealand pun bersama dengan AS dan Australia menjadikan Terorisme sebagai ancaman terhadap negaranya dalam dinamika keamanan kontemporer. Hal ini bisa dilihat dimana, New Zealand mengeluarkan *travel warning* ke Indonesia. Alasannya, diperkirakan aktivitas terorisme di saat liburan Natal dan Tahun Baru akan meningkat (Poernomo G. Ridho, 2003). New Zealand memiliki komitmen yang cukup besar terhadap aktivitas terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu implementasinya adalah dengan memanfaatkan *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* dalam penanggulangan terorisme untuk mengimplementasikan *Joint Declaration to Combat International Terrorism*.

New Zealand secara geografis terletak di Pasifik Selatan dengan bentuk kepulauan. Oleh karena itu New Zealand mengutamakan kepada keamanan pada wilayah maritim. Hal ini terkait dengan lalu lintas perdagangan dengan negara lain yang menjadi penopang dari kehidupan ekonomi negaranya. Oleh karena itu negara memposisikan dirinya sangat rawan dari serangan teroris karena berada di lautan yang cukup luas dan cukup jauh dari para sekutunya. Pernyataan ini secara implisit tertuang dalam buku putih pertahanan yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan New Zealand tahun 2010 “*Because of our geographic isolation, sea border, and relatively small international footprint, the possibility of a terrorist attack on New Zealand is likely to remain lower than in other western states but will rise if we are seen as an easy target*”(New Zealand Government, 2010).

Masih dalam buku putih pertahanannya New Zealand melihat potensi ancaman yang berada di Asia Tenggara, diantaranya;

1. *“Economic growth has enabled substantial military modernisation programmes in Southeast Asia, including naval and submarine fleets. ASEAN states generally recognise that their interests are best served by continued peace, but future security challenges will include Islamist and other forms of terrorism, weapons proliferation, and piracy.*
2. *There are tensions within and between some ASEAN countries which regional structures can help ameliorate but not remove. Economic growth, economic integration, intra-ASEAN ties, and shared concerns over the strategic balance in the region will help to underwrite regional stability. But points of abrasion will nonetheless remain.*
3. *The outlook for parts of mainland Southeast Asia has some uncertainty, with various points of tension having the potential to ripple more widely. The situation in maritime Southeast Asia is ostensibly more stable but there will remain a number of unresolved territorial disputes. The terrorist presence in Southeast Asia will remain a significant regional risk”.*

Meskipun telah memiliki kerjasama secara bilateral dengan negara-negara ASEAN namun, New Zealand merasa hal tersebut tidak efektif. Hal ini terkait dengan kesulitan bagi New Zealand untuk secara bebas melakukan latihan atau pengenalan medan terkait dengan identitas dari New Zealand sebagai “pihak luar”. Berbagai ancaman yang kemudian muncul sebagai akibat dari konstruksi identitas New Zealand harus dihadapi secara kolektif. Upaya untuk menghadapi ancaman tersebut salah satunya dilakukan melalui FPDA yang menjadi sebuah jalan bagi New Zealand untuk masuk kedalam kawasan Asia Tenggara. Hal ini terkait dengan adanya dua negara didalam kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura dan Malaysia yang tergabung dalam FPDA. Selain itu berbagai latihan yang digelar dalam kerangka FPDA ini senantiasa mengambil tempat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini akan memudahkan bagi New Zealand bila suatu saat harus masuk kedalam kawasan Asia Tenggara untuk mengamankan kepentingannya. Maupun untuk mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan kemungkinan ancaman yang akan tertuju kepada negaranya.

Konstruksi Ancaman Terkait Identitas dan Kepentingan Malaysia Dalam FPDA

Berakhirnya konstelasi perang dingin dikawasan Asia Tenggara membuat Malaysia dan Indonesia menjadi salah satu negara “pemimpin” yang senantiasa mempromosikan keamanan dan stabilitas kawasan. Kebijakan terhadap AS yang dilakukan oleh Malaysia sangat berbeda dengan kebijakan negara lain didalam FPDA yang ada dikawasan ini yaitu Singapura. Meskipun demikian, Malaysia masih tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Inggris terkait dengan faktor historisnya.

Disisi lain, Malaysia memiliki identitas sebagai negara “muslim” dengan mayoritas penduduknya merupakan penganut islam dengan aturan hukum Islam yang berlaku dinegaranya. Malaysia menjadi lahan subur bagi berkembangnya gerakan ekstrimis islam terlebih negara ini sering menjadi

pintu gerbang bagi orang-orang yang ingin melakukan “jihad” diberbagai wilayah konflik seperti di Thailand, Afghanistan maupun Filipina Selatan. Namun, pemerintahan Malaysia yang cenderung tertutup dan menggunakan pendekatan represif membuat banyak gerakan ekstrimis islam bermunculan yang saat ini dikenal dengan terorisme. Gerakan-gerakan ini kemudian dipaksa keluar dari wilayah Malaysia dan kemudian menjadikan Indonesia sebagai basis operasinya. Target yang kemudian menjadi sasaran adalah kepetingan dan simbol negara barat yang ada di negara-negara Asia Tenggara.

Terlebih pasca serangan 11 September, terorisme menjadi musuh bersama yang harus diperangi. Hal ini yang kemudian membuat negara ini semakin represif terhadap gerakan-gerakan ekstrimis yang dilabeli dengan terorisme dinegaranya. Tetapi banyak pihak yang meyakini bahwa aktivitas ekstrimis yang kemudian dilabeli teroris ini dengan nama *Al Jama'ah Al Islamiyah* (AJAI) yang menjadi ancaman tersebut tidak lebih hanya merupakan reakaan dari AS dan sekutu regionalnya dikawasan Asia Tenggara (terutama Australia, Singapura, Malaysia dan Philipina) dan pihak-pihak yang ingin menyudutkan islam secara umum dan Indonesia pada khususnya (Bilver Singh, 2007: 50). Kebijakan ini membuat gerakan ini kemudian berpindah ke negara tetangganya yaitu Indonesia, hal ini terbukti dimana tokoh kunci gerakan terorisme di Indonesia adalah warga negara Malaysia. Aksi-aksi dari gerakan ini yang kemudian menjadi kekhawatiran bagi Malaysia, karena meski tidak menjadi simbol AS, Malaysia tetap menjadi sekutu dari Inggris dengan identitas “barat” yang masih ada pada dirinya. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian dari sistem pertahanan dan keamanan Malaysia jika gerakan ini kembali ke negaranya.

Selain permasalahan tersebut Malaysia memberikan perhatian terhadap 3 kawasan yang dipandang sebagai memiliki kepentingan nasional besar bagi Malaysia. Kawasan tersebut antara lain Laut China Selatan, Selat Malaka dan Selat Singapura. Dimana Malaysia perlu mempertahankan dan meningkatkan usaha untuk mempertahankan kedaulatannya atas semua daratan dan perairan termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen dimana pembangunan militer Malaysia harus didasarkan kepada upaya untuk mempertahankan kepentingan negara pada ketiga kawasan tersebut (Kementerian Pertahanan Malaysia, 2010: 13). Oleh karena itu kerawanan keamanan pada ketiga wilayah ini akan menjadi ancaman terhadap keamanan Malaysia yang harus diatasi. Hal ini menjadi ancaman terkait dengan setiap gangguan keamanan di kawasan itu, baik dalam bentuk konflik internal dan eksternal wilayah daerah, akan berdampak pada keamanan nasional (<http://www.mod.gov.my>).

Permasalahan di Laut China Selatan dan Laut Andaman. Malaysia menjadi salah satu dari 4 negara ASEAN yang memperebutkan wilayah di Laut China Selatan dengan China dan Taiwan. Malaysia menganggap bahwa kehadiran China yang sama-sama melakukan klaim terhadap wilayah itu sebagai ancaman yang cukup

serius. China yang telah berkembang menjadi kekuatan besar Asia sejak lama dianggap menjadi ancaman bagi Malaysia. Dimana, Malaysia menganggap China sebagai ancaman jangka panjang terkait dengan hubungan sejarah yang cukup panjang antara China dengan Partai Komunis Malaysia (Stephen Leong, 1987). Meski banyak yang melihat hubungan China dengan negara-negara ASEAN cenderung kooperatif namun persepsi tiap negara akan berbeda, salah satunya adalah dengan Malaysia. Sengketa yang terjadi di Laut China Selatan menimbulkan kembali persepsi ancaman yang ada di masa lalu dalam konteks kekinian pada kasus sengketa ini. Terlebih saat ini China tengah gencar untuk melakukan upaya modernisasi angkatan bersenjata khususnya angkatan laut.

Selain itu dalam kaitan dengan ancaman yang berada dikawasan Selat Malaka dan Singapura adalah permasalahan perompakan. Dimana hal ini akan sangat berpengaruh kepada keamanan maupun perekonomian dunia. Ancaman yang dirasakan oleh Malaysia tidak datang secara langsung dari kegiatan perompakan ini. Malaysia sangat khawatir jika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan akan mengundang kekuatan asing untuk datang ke wilayah ini demi mengamankan kepentingannya. Malaysia sebagai salah satu “pemimpin” dikawasan Asia Tenggara tidak menginginkan hal ini terjadi, meskipun Malaysia dekat dengan pihak barat yaitu Inggris tetapi kredibilitas Malaysia sebagai negara “besar” akan terancam jika ada kekuatan asing yang hadir dikawasan ini.

FPDA digunakan oleh Malaysia untuk kepentingan-kepentingan pengamanan wilayah baik terkait sengketa teritorial maupun pengamanan wilayah dari berbagai tindakan teror dan perompakan. Dengan FPDA Malaysia mendapatkan bantuan baik secara teknis dengan mekanisme konsultasi maupun dukungan secara politis dari negara-negara anggota yang lain. Malaysia akan dapat menghindarkan adanya intervensi secara langsung dari kekuatan-kekuatan besar diluar kawasan yang berkepentingan untuk hadir secara fisik dikawasan ini. Dalam buku putih pertahanan tahun 2010 mengenai kerjasama dengan negara diluar ASEAN, Malaysia memandang FPDA sebagai “jaring penyelamat” apabila terdapat ancaman yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh angkatan bersenjata Malaysia. Sebagai satu-satunya kerjasam pertahanan yang diikuti oleh Malaysia sejak tahun 1971, meskipun belum teruji secara langsung dalam menghadapi konflik terbuka, namun Malaysia memandang bahwa FPDA merupakan salah satu upaya untuk mencegah berbagai ancaman yang datang terhadap negaranya serta telah berjasa dalam mengembangkan profesionalisme angkatan bersenjata Malaysia.

Konstruksi Ancaman Terkait Identitas dan Kepentingan Singapura Dalam FPDA
Sebagai “minoritas”, Singapura yang berada ditengah-tengah negara besar dikawasan Asia Tenggara, yang membuat negara ini senantiasa merasa tidak

aman. Terlebih Singapura memiliki kebijakan luar negeri yang sangat kontras dengan negara-negara di kawasan ini. Singapura memiliki hubungan yang sangat dekat dengan AS dan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan Lee KuanYew secara eksplisit mengatakan bahwa, “negaranya harus bersaing dalam kondisi permusuhan dengan negara tetangga yang lebih besar” (Edigius Patnisnik, 2011). Hal ini terkait dengan konfrontasi yang kerap terjadi dengan negara-negara besar yang ada di kawasan ini seperti Indonesia maupun Malaysia sendiri pasca lepas sebagai bagian dari negara tersebut.

Interaksi sosial yang terjadi antara Singapura dan negara-negara di dalam kawasan Asia Tenggara cenderung bersifat konfliktif, hal ini yang kemudian menjadi identitas yang membentuk kebijakan pertahanan Singapura. Sebagai negara kepulauan kecil, Singapura membangun kekuatan militer yang sangat canggih dan cukup besar, hal ini merupakan produk dari interaksi yang terjadi dengan negara-negara di dalam kawasan ini. Dimana Singapura merasa bahwa sebagai negara kecil Singapura harus memiliki kekuatan militer yang kuat sehingga menjadi *deterrence* yang efektif agar tidak “diganggu” oleh negara-negara besar.

Diplomasi dan *deterrence* menjadi dua pilar utama yang menjadi dasar bagi kebijakan pertahanan Singapura (Singapore Ministry of Defence, 2000: 12). Diplomasi yang dilakukan harus ditunjang dengan kekuatan militer yang kuat, mengingat posisi Singapura seringkali tidak dianggap dalam politik kawasan maupun internasional. Terlebih saat ini berbagai isu keamanan mulai mengemuka baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik yang akan berdampak bagi Singapura. Oleh karena itu Dr Tony Tan dalam pidatonya di depan *1st General Meeting of the Council for Security Co-operation in the Asia-Pacific* (CSCAP) menekankan bahwa kepentingan Singapura hanya akan dicapai dengan “memiliki arsitektur keamanan yang terdiri dari hubungan bilateral yang kuat terjalin dengan pengaturan keamanan multilateral”. Oleh karena hal ini adalah keuntungan bagi Singapura dimana hubungan memberikan *deterrence* terhadap agresi dan mempromosikan keamanan regional (Ang Wee Han, 1998: 3). Meskipun Singapura masuk ke dalam ASEAN dalam kerangka pengaturan keamanan multilateral, tetapi identitas yang terbentuk dalam interaksi yang bersifat konfliktif membuat negara ini cenderung lebih memilih condong kepada FPDA.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri pertahanan Singapura Theo Chee Hean bahwa Angkatan bersenjata Singapura telah membangun kerjasama pertahanan yang baik dan cukup dekat dengan berbagai negara di dunia. Salah satu contoh yang baik adalah *Five Power Defence Arrangement* yang kami menandatangani pada tahun 1971 dengan Australia, Malaysia, Selandia Baru dan Inggris. Penyebutan FPDA sebagai contoh menunjukkan

bahwa Singapura lebih percaya dan yakin dengan kerangka ini dari pada ARF maupun APSC yang saat ini sedang dikembangkan untuk memperkuat kerjasama dalam ASEAN. Interaksi Singapura dengan negara-negara yang berada didalam FPDA lebih kooperatif karena telah terjadi lebih dari 39 tahun serta terkait dengan identitas sebagai persemakmuran Inggris dibandingkan dengan negara-negara lain. Interaksi ini yang kemudian membentuk identitas dari Singapura, dengan identitas ini Singapura dapat memprediksi atau mengkonstruksikan apa yang menjadi ancaman bagi negara ini.

Ancaman terhadap Singapura terkait dengan identitas negara ini sebagai negara dengan mayoritas etnis China dan terkait dengan status sebagai negara bekas jajahan Inggris yang cenderung condong kepada pihak “barat”. Ancaman terkait dengan identitas Singapura sebagai negara dengan etnis China di Asia Tenggara adalah ketakutan akan munculnya sentimen rasial di Malaysia pada tahun 1969 (Tim Huxley, 2000: 33), dan Indonesia pada tahun 1998 yang dikhawatirkan akan menyebar ke Singapura. Hal ini tentu saja akan menimbulkan instabilitas didalam negeri yang akan membahayakan pembangunan ekonominya. Dalam konteks kekinian yang tertuang dalam garis besar pertahanan Singapura hal ini menjadi salah satu ancaman bagi negara ini. Singapura masih mengkhawatirkan akan adanya *spill over effect* dari konflik-konflik internal di negara tetangganya terkait dengan transisi politik seperti yang terjadi di Kamboja dan Timor Leste.

Seperti negara-negara yang dekat dengan “barat” ketakutan Singapura pada masa perang dingin adalah ancaman komunisme yang berkembang di Indocina. Namun dalam konteks pasca perang dingin, ancaman tersebut datang dari terorisme yang menargetkan sasaran kepentingan pihak “barat” yang dalam hal ini banyak terdapat di Singapura. Selain itu, perompakan dan konflik diantara negara besar dikawasan Asia Tenggara menjadi ancaman lain terkait dengan identitas Singapura sebagai salah satu “pusat ekonomi dunia”. Dimana hal tersebut dianggap akan membahayakan identitas Singapura dan akan mengganggu kepentingan nasional mereka yaitu stabilitas ekonomi.

Kampanye perang melawan terorisme yang di usung oleh AS tidak pelak membuat kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu front dalam upaya AS memerangi terorisme. Sebagai sebuah negara yang menjadi sekutu pihak barat Singapura pun menjadikan terorisme sebagai ancaman nyata bagi negaranya. Bahkan judul buku putih pertahanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura pada tahun 2004 diberi judul: *The Fight Against Terrorism Singapore National Strategy*. Dalam sambutannya secara eksplisit Dr Toni Tan Keng Yam, Deputy Perdana Menteri Singapura untuk urusan keamanan dan pertahanan mengatakan bahwa terorisme menjadi ancaman yang serius karena Singapura menjadi sasaran yang empuk bagi tindakan tindakan terorisme tersebut karena

telah ikut kampanye global melawan terorisme global (Singapore Ministry of Defence, 2004: 7).

Selain terorisme yang beroperasi di daratan, Singapura juga menaruh perhatian yang cukup besar terhadap tindakan teror di laut atau yang dikenal dengan bajak laut. Singapura mengasosiasikan aktivitas bajak laut sebagai aksi terorisme. Perhatian terhadap ancaman terorisme ini disampaikan oleh menteri Transportasi Yeo Cheow Tong pada Konferensi Internasional Keamanan Maritim dan Pelabuhan pada 21 Januari 2010. Dalam pernyataannya menteri Yeo mengatakan bahwa aktivitas perkapalan global dan industri pelabuhan merupakan mesin penggerak utama perdagangan dunia, serangan terhadap lalulintas pelayan dan pelabuhan merupakan gangguan serius bagi perdagangan dimana Asia Tenggara dan Singapura termasuk didalamnya dan tidak bisa terhindar dari ancaman tersebut. Dimana sejak serangan 11 September keamanan di sekitar selat Singapura telah ditinjau ulang dan ditingkatkan untuk mencegah ancaman tersebut terjadi kepada Singapura.

Ancaman lain yang kemudian menjadi kekhawatiran dari Singapura adalah munculnya konflik perbatasan serta hadirnya negara-negara besar dalam konstelasi politik regional. Ancaman ini terkait dengan stabilitas kawasan yang sangat diperlukan terkait dengan kepentingan Singapura pada pertumbuhan ekonomi. Sengketa perbatasan dikawasan Asia Pasifik termasuk terkait kepulauan Spratley dan Paracel di Laut China Selatan, Konflik di semenanjung Korea dan isu hubungan China dan AS. Dimana bila hal ini tidak dikelola secara baik akan menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas keamanan regional. Singapura tidak ingin hal tersebut terjadi karena akan membahayakan bagi pertumbuhan ekonomi Singapura.

Bagi negara maju, persoalan chaos, kriminalitas dan berbagai kondisi yang terjadi di daerah tidak aman, diperhitungkan sebagai bersifat menyebar dan sangat berpotensi mengganggu keamanan nasionalnya (Connie Rahakundini Bakrie, 2007: 12). Hal ini yang membuat beberapa negara maju yang dalam hal ini adalah Singapura menerapkan strategi pertahanan yang bersifat keluar (*outward looking*) dengan melakukan usaha-usaha pencegahan. Filosofi pertahanan Singapura didasarkan kepada premis untuk mengembangkan daya penangkalan dan deterrence terhadap ancaman tersebut ditempat ancaman itu berasal (Tim Huxley, 2000: 24).

Meski Singapura telah memiliki kapabilitas dalam hal kekuatan militer yang lebih dari cukup untuk mempertahankan negaranya, namun FPDA masih dirasakan perlu bagi Singapura untuk lebih menguatkan dan melindungi identitas yang dimiliki. Terlebih sebagai negara “minoritas” dikawasan Asia Tenggara FPDA akan menguatkan identitas Singapura. Upaya ini sebagai bagian dari kedekatannya dengan negara barat khususnya Inggris dan AS yang

memiliki peran penting untuk mencapai kepentingan nasional Singapura. Selain itu sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sangat memerlukan negara-negara besar dalam mendukung dan meningkatkan perekonomiannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Singapura adalah semakin mendekatkan diri terhadap negara-negara barat hal ini terkait dengan munculnya raksasa ekonomi baru di kawasan Asia yang menjadi pesaing Singapura.

Ancaman yang telah dikonstruksikan oleh masing-masing negara anggota FPDA berdasarkan identitas dan kepentingannya kemudian harus disosialisasikan kepada negara anggota lain sebagai ancaman bersama. Dimana hal ini akan membentuk identitas kolektif dalam kerangka FPDA untuk menghadapi ancaman yang dikonstruksikan berdasarkan identitas kolektif tersebut. Dimana, *Arrangements* ini merupakan peran primordial dalam menopang ekspektasi dalam upaya saling mendukung dan melindungi diantara negara-negara bekas jajahan Inggris (Rosita Dellios, 1997: 2). Dalam hal ide awal pembentukan FPDA yang berawal dari Inggris sebagai negara yang menjadi sponsor utama untuk melindungi Malaysia dan Singapura terhadap dari komunisme sebagai pengetahuan mengenai ancaman sebagai hasil dari interaksi negara tersebut pada masa perang dingin.

Pada masa perang dingin negara dengan identitas Barat akan merasa bahwa negara dengan identitas komunis akan menjadi ancaman terhadap identitasnya, demikian pula sebaliknya. Ekspansi merupakan tujuan dari komunis untuk menguasai dunia telah menjadi akar dari pemikiran barat sejak tahun 1948 (Richard Harris, 1963: 13). Hal ini terjadi akibat dari interaksi yang bersifat konfliktif dalam hal persaingan perebutan ideologi oleh kedua negara. Kedua identitas akan mengkonstruksikan identitas lain sebagai ancaman yang harus dibendung atau dicegah penyebarannya.

Kesimpulan

Konstruksi ancaman yang dilakukan oleh negara-negara yang ada didalam FPDA membuat kerangka ini masih dipertahankan terkait dengan identitas dan kepentingan mereka. Dimana identitas dan kepentingan tersebut dibentuk melalui ide terhadap ancaman yang didasarkan kepada interaksi dari negara-negara tersebut dengan negara lain dalam konteks sosial yang membentuk identitas dari negara masing-masing. Identitas dan kepentingan tersebut menjadi dasar bagi konstruksi ancaman yang dilakukan oleh kelima negara yang tergabung dalam FPDA. Perubahan yang terjadi terhadap identitas dan kepentingan yang terjadi akibat pergeseran dari era perang dingin ke era pasca perang dingin tetap membuat FPDA bertahan. Perubahan terhadap identitas dan kepentingan negara-negara yang ada didalamnya membuat FPDA semakin kuat dan berkembang dalam hal kemampuan mengangani berbagai konstruksi ancaman tersebut.

Konstruksi ancaman yang dilakukan oleh Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia dan Singapura kemudian menjadi ancaman bersama dalam kerangka FPDA. Pembentukan ancaman bersama ini terkait dengan komunikasi intersubjektif yang dilakukan oleh negara-negara tersebut terhadap konstruksi ancaman masing-masing. Komunikasi intersubjektif ini dilakukan melalui kerangkaan pertemuan informal diantara menteri pertahanan kelima negara tersebut disela-sela pertemuan SLD yang membahas mengenai permasalahan keamanan dikawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan ini konstruksi ancaman kemudian dirancang untuk dimaterialisasikan dalam bentuk rancangan latihan bersama dalam kerangka FPDA. Latihan yang dilakukan oleh FPDA selama perang dingin dan pasca perang dingin menunjukan secara nyata konstruksi ancaman yang dipersepsikan oleh negara-negara dalam FPDA tersebut.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2010. "Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara" *Spektrum, Suplemen Tabloid Diplomasi*, edisi 4 Tahun I, September 2010.
- Archaya, Amitav. 2002. *Regionalism and Multilateralism Essay on Cooperative Security in Asia Pacific*, Singapore: Eastern Universties Press.
- Australian Government Departement of Defence, 2009. *Australia Defence White Paper 2009. Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030*, Canberra.
- Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bakti, Ikrar Nusa. (eds). 2005. *Kebijakan Pertahanan Australia 2005-2006 dan Respon Negara-negara Asia Timur dan Selandia Baru*, Jakarta: P2P LIPI.
- Boswood, Kate. 2008. "Engaging Our Interest : The Five Power Defence Arrangements and It's Contribution to Regional Security", *Defence Magazine*, No. 9
- Bristow, Damon. 2005."The Five Power Defence Arrangements: Southeast Asia's Unknown Regional Security Organization", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 27, April.
- Buku Putih Pertahanan Malaysia. 2010. *Dasar Pertahanan Negara*, Kementrian Pertahanan Malaysia Huxley, Tim. 2000. *Defending The Lion City*, New Southwales: Allen & Unwin.
- Dellios, Rosita. 1997. *Mandalas of Security, Humanitis & Social Sciene Papers*, Australia: Bond University
- Goldstein, Walter. 1970. "British Defense & Alliance Strategy: The Strategic Quandary of a Middle Power". *Polity*, Vol. 3, No. 2
- Han, Ang Wee. 1998. "Five Power Defence Arrangements: Singapore Prespective", *Pointer* Vol. 24. No. 2
- Harris, Richard. 1963. "Communism and Asia: Illusions and Misconception", *International Affair (Royal Institute of International Affair)*, Vol.39, No.1

- J, M. Jamaludin. 2006. "Expanding its Role Beyond Security Concern". *Security Issues*, ADJ July & August
- Leong, Stephen. 1987. "Malaysia and The People's Republic of China in the 1980s: Political Vigilance and Pragmatism", *Asia Survey*, Vol 27, No. 10
- Menon, K.U. 1988. "A Six Power Defence Arrangements in Southeast Asia", *Contemporary Southeast Asia Journal* Vol. 10 No. 3
- New Zealand Government. 2010. *Defence White Paper 2010*. Wellington: Ministry of Defence.
- San, Khoo How. 2000. "The Five Power Defence Arrangements : If It Ain't Broke...". presented as part of the ASEAN Regional Forum's professional development programme for foreign affairs and defence officials held in Brunei Darussalam from 23 to 28 April
- "Security Challenges and Responses in the Asia-Pacific", Pidato Dr Tony Tan, dalam 1st General Meeting of the Council for Security Co-operation in the Asia-Pacific (CSCAP), Rabu, 4 Juni 1997.
- Singh, Bilveer. 2007. *Talibanization In Southeast Asia: Losing The War on Terror to Islamist Extremist*, Westport: Praeger Security International.
- Singapore Ministry of Defence, 2000. *Defending Singapore in the 21st Century*. Singapore.
- Singapore Ministry of Defence. 2004. *The Fight Againsts Terrorism: Singapore National Strategy*
- Thayer, Charlyl A. 2007. "The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever", *Security Challenge*, Vol. 3 No. 1
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, *International Organization*, Vol. 46 No.2

Online Articles

- Dr Liam Fox, "Defence Secretary Meets Malaysia Prime Minister", Website Ministry Of Defence United Kingdom, 17 Januari 2011.
<http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/DefenceSecretaryMeetsMalaysianPrimeMinister.htm>
- Edigius Patnisnik, " Lee Kuan Yew Desak Muslim Lebih Moderat" Kompas, Senin 24 Januari 2011,
<http://internasional.kompas.com/read/2011/01/24/15124739/Lee.Kuan.Yew.Desak.Muslim.Lebih.Moderat>
- Gerald Neo. "RSN Host This Year's FPDA Exercise : Exercise Bersama Lima 04", Navy News, Mei 2004.
- Graham McBean, "Suman Test Human : A Successful Exercise in Theory and Practice of Combined Operation",
<http://www.defence.gov.au/news/armynews/editions/1108/features/feature01.htm>
- Hendrajit, "Singapore, Malaysia dan Inggris Membesar-Besarkan Aksi Perompakan di Selat Malaka", Global Future Institute, 15 Mei 2010,

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1919&type=99
Ikrar Nusabakti, "Mencairkan Selimut Salju" Tempo online, 17 Desember 2000,
<http://majalah> "China dan Kepentingan Indonesia", Media Indonesia, 13 April
2010, <http://bataviase.co.id/node/167790>
"Defending Singapore: Strategies For A Small State", Website Ministry Of
Defence Singapore, 21 April 2005.
http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2005/sep/15sep05_nr.html
"Exercise Bersama Lima 2005" Website Ministry Of Defence Singapore, 15
September 2005.
"Exercise Bersama Lima 2009", 4 Juni 2010,
http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2009/oct/09oct09_nr/09oct09_fs.html
"FPDA 'Understand Our Position on Foreign Forces in Strait'", IISS, 8 Juni 2004,
<http://www.iiss.org/conferences/the-shangri-la-dialogue/press-coverage/press-coverage-2004/the-star---fpda-understands-our-position/?locale=en>
"Hillary Bahas Masalah Keamanan di Australia", Media Indonesia, Sabtu, 6
November 2010, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/Hillary-Bahas-Masalah-Keamanaan-di-Australia>
"HMAS Sirius on Exercise Bersama Lima 08", Australia Departemen of Defence,
28 Oktober 2008,
<http://www.defence.gov.au/media/download/2008/oct/20081028a/index.htm>
"Malaysia Defence Policy", Website Malaysia Ministry of Defence,
<http://www.mod.gov.my/>
"Singapore Ministry of Defence press release", IISS, 6 Juni 2005,
<http://www.iiss.org/whats-new/iiss-in-the-press/press-coverage-2005/june-2005/conclusion-of-the-4th-shangri-la-dialogue/?locale=en>
"Staying Relevant in Enhancing Regional Security", Publication of Singapore
Armed Forces, Singapore Ministry Of Defence, 1 Juni 2009,
http://www.mindef.gov.sg/imindef/publications/cyberpioneer/news/2009/June/01jun09_news2.html
tempointeraktif.com/id/arsip/2000/12/17/KL/mbm.20001217.KL115404.id.html